

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGGUNAAN
DANA APBN DAN DAK DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2012 – 2014**

Rachmaeny Indahyani¹
irachmaeny@yahoo.co.id

Abstract

This study generally aims to analisis implementation and recommendation policy for alocation budget APBN and DAK TA 2012 – 2014 in Jayawijaya City. More specific, the objectives are: (a) determine and analyze planning programing alocation budget APBN and DAK TA 2012 – 2014 in Jayawijaya City, (b) identify and analyze Implementation alocation budget APBN and DAK TA 2012 – 2014 in Jayawijaya and c) Recommendation budgeting policy for future planning budgeting.

Keywords: Planing Programming, Implementation Programming, Monitoring and Evaluation, Recommendation Budgeting Policy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Empat belas tahun sudah masa pemerintahan era Reformasi yang identik dengan system pemerintahan yang bersifat desentralisasi berlalu, masa pemerintahan ini dimulai sejak dikeluarkannya peraturan UU No 21 tahun 2001 sampai sekarang, Sudah banyak terjadi perubahan dalam pembangunan daerah diberbagai bidang kearah yang lebih baik, Desentralisasi merupakan sebuah instrument untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan system pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas : Desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiscal dan desentralisasi ekonomi.

Menurut Machfud Sidik (1994 :4) dalam tulisannya yang berjudul” Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Kedepan Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah” menyatakan bahwa ada tujuh persyaratan untuk keberhasilan desentralisasi: 1). Tahapan pelaksanaan harus realitis disesuaikan dengan pengembangan institusi, Sistem dan prosedur, mekanisme koordinasi, pengembangan SDM; 2). Keselarasan antara proses penyerahan kewenangan fungsi-fungsi pemerintah dengan pengalihan pembiayaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia dan dokumen; 3). Desain dan kerangka kerja

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

proses desentralisasi harus terkait dengan kemampuan keuangan dan kewenangan fiskal; 4). Masyarakat harus diberi informasi yang transparan; 5). Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan preferensinya; 6). Adanya jaminan sistem akuntabilitas public; 7). Instrumen desentralisasi berupa peundangan, kelembagaan, struktur pelayanan perlu dilengkapi.

Begitu luasnya makna desentralisasi, oleh karena itu, Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya mengenai bagaimana perkembangan dari desentralisasi fiskal, hal ini terkait dengan latar belakang ilmu si peneliti yaitu sebagai seorang dosen yang berkonsentrasi pada mata kuliah keuangan daerah. Desentralisasi fiskal (Machfud Sidik : Hal 7:1999) adalah salah satu komponem utama dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan sector public, maka mereka harus didukung sumber – sumber keuangan yang memadai, yang berasal dari PAD, pinjaman maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan berpedoman hal – hal sebagai berikut: Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement, Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan desentralisasi fiskal Salah satu sumber keuangan daerah adalah dana perimbangan yang berasal dari dana APBN, salah satu bagian dari dana perimbangan adalah dana DAK, dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program kegiatan yang menjadi wewenang daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK adalah agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan pasarana pelayanan public secara memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum masing- masing bidang. Menurut Irwan Taufiq Ritonga (hal: 187:2005) Dana DAK dialokasikan berdasarkan tiga criteria, yakni: 1. kriteria umum, criteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang di cerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai; 2. Criteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan karakteristik daerah dan; 3. Criteria teknis adalah criteria yang mencerminkan kondisi sarana dan prasarana masing- masing bidang. Berdasarkan teori diatas Adapun realisasi Rekap APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Papua dari Tahun 2011 – 2013 terus mengalami peningkatan pertahunnya. Besar alokasi dana APBN pertahunnya adalah sebagai berikut: Tahun 2011 sebesar Rp. 31.568.641.80, Tahun 2012 Rp. 30.636.167.60, Tahun 2013 Rp. 35.784.898.50. Dana DAK merupakan bagian dari APBN dimana perkembangan dana DAK pertahunnya adalah sebagai berikut: Tahun 2011 Rp. 2.316.532.00, Tahun 2012 Rp. 2.002.612.00, tahun 2013 Rp. 2.399.965.00 data tersebut adalah total dana DAK pertahun yang diterima oleh provinsi Papua secara keseluruhan. Dari total dana yang diterima tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari bagaimana proses perencanaan, pengelolaan dan hasil yang diperoleh, akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Dan tempat

penelitian yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua yang mempunyai potensi wisata yang cukup terkenal di manca Negara. Dan kabupaten ini dapat dikatakan sebagai jantung dari Papua, yang memiliki keunikan dalam adat istiadatnya. Ada pepatah yang mengatakan jika ke Papua belum ke Wamena sama saja belum pergi ke Papua. Dengan adanya alokasi dana APBN khususnya dana DAK diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik untuk pembangunan khususnya di Wamena Ibukota Jayawijaya.

Agar penelitian ini bisa menganalisis bagaimana proses keuangan yang berjalan maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini akan menjelaskan secara terstruktur mengenai bagaimana proses pengelolaan dana APBN khususnya dana Dak. Dan bagaimana implementasi proses perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan penggunaan dana APBN khususnya dana DAK tahun anggaran 2011 – 2014 di Kabupaten Jayawijaya.

Adapun yang menjadi dasar payung hukum dari pelaksanaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi adalah peraturan Menurut PP No 39/2006 “tentang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan” Untuk merealisasi pelaksanaan keuangan daerah yang baik diperlukan langkah – langkah yang realisitis seperti: Tahap pertama, perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan dan anggaran; Tahap kedua, perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD dan swasta) dan pelaku pembangunan (Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga internasional); Tahap ketiga perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemda; Tahap ke empat adalah perlu adanya peningkatan komunikasi yang konstruktif. Dalam Penelitian ini penulis tertarik untuk mempelajari mengenai bagaimana penerapan pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan dana yang bersumber dari dana APBN khususnya dana DAK untuk tahun anggaran 2011- 2013 di Kabupaten Jayawijaya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi Penggunaan dana APBN dan Dak tahun anggaran 2012-2014 di kabupaten Jayawijaya pada empat bidang yang diprioritaskan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan?; 2) Bagaimanakah capaian kinerja penggunaan dana APBN dan DAK tahun anggaran 2012-2014 Di Kabupaten Jayawijaya?; dan 3) Bagaimanakah arah kebijakan keuangan daerah yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan perencanaan dimasa mendatang?

Tujuan secara umum yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tentang implementasi proses perencanaan, pengelolaan dan masalahnya serta kebijakan dalam penggunaan dana APBN dan Dak tahun anggran 2012-2014 di Kabupaten Jayawijaya, pada empat bidang yang diprioritaskan (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan)

yang ditujukan guna percepatan pembangunan dikawasan timur Indonesia. Sedangkan Tujuan Secara khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: a) Mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan dana APBN dan Dak tahun anggaran 2012-2014 di kabupaten Jayawijaya pada empat bidang yang diprioriaskan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan; b) Mengidentifikasi dan menganalisis capaian kinerja penggunaan dana APBN dan Dak tahun anggaran 2012-2014 Di Kabupaten Jayawijaya; dan c) Menetapkan arah kebijakan keuangan daerah yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan perencanaan dimasa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah instrument untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan pelayanan public yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan public yang lebih demokratis. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan social dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas : Desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi.

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk dapat memahami “teori perencanaan pembangunan daerah” maka ada beberapa hal yang harus diketahui , yaitu mengenai definisi dari perencanaan, apa yang menjadi tujuan utama perencanaan pembangunan daerah, prinsip pembangunan daerah, tahapan rencana pembangunan daerah dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan *perencanaan* adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Atau kata lainnya adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* ditujukan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya yang ada dan untuk meningkatkan kapasitas sector swasta dalam mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan. *Perencanaan pembangunan daerah* adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam era reformasi keuangan daerah dikenal istilah PPBS, PPBS adalah *Planning, Programming and Budgeting System* (PPBS) merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada sistem perencanaan formal yang berorientasi pada output dan tujuan. Penekanan utamanya adalah alokasi

sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan kerangka untuk membuat pilihan tersebut.

Fungsi atau manfaat dari perencanaan adalah sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi dari inefisiensi sumberdaya dan dalam penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

Tujuan Utama Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan PP No. 8 tahun 2008

- Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
- Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran
- Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik
- Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan
- Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- Untuk mempelajari apakah perencanaan yang telah disusun sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, apakah itu berupa Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan

Teori Pelaksanaan Keuangan Daerah; “Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi”

Adapun yang menjadi dasar payung hukum dari pelaksanaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi adalah peraturan Menurut PP No 39/2006 “tentang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan” dimana definisi dari **Pengendalian** adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian Pembangunan daerah meliputi:

- Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup

provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

- Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pengendalian sebagaimana dimaksud diatas meliputi pengendalian terhadap : kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Definisi dari Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Definisi dari Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (Outcome) terhadap rencana standar. Evaluasi pembangunan daerah meliputi:

- Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap : kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan hasil rencana pembangunan daerah.

Untuk merealisasi pelaksanaan keuangan daerah yang baik diperlukan langkah – langkah yang realitis seperti: Tahap pertama, perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan dan anggaran; Tahap kedua, perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD dan swasta) dan pelaku pembangunan (Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga internasional); Tahap ketiga perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemda; Tahap ke empat adalah perlu adanya peningkatan komunikasi yang konstruktif.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak, Dana alokasi Umum, dana alokasi Khusus dan dana otonomi khusus. Dana Bagi Hasil (DBH), DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan pajak yang dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai DBH pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 WPOPDN dan Pasal 21

DAU dialokasikan kepada daerah dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Pengalokasian DAU adalah tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah sehingga semua daerah mampu untuk mendanai semua urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai equalization grant, DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar Daerah (horizontal imbalances).

Salah satu sumber keuangan daerah adalah dana perimbangan yang berasal dari dana APBN, salah satunya adalah dana DAK. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program kegiatan yang menjadi wewenang daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK adalah agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan public secara memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum masing-masing bidang. Menurut Irwan Taufiq Ritonga (hal: 187) Dana DAK dialokasikan berdasarkan tiga kriteria, yakni: 1. kriteria umum, kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan – kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang di cerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai; 2. Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan karakteristik daerah dan; 3. Kriteria teknis adalah kriteria yang mencerminkan kondisi sarana dan prasarana masing-masing bidang.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dengan judul Analisis Implementasi perencanaan, pelaksanaan dan masalahnya serta kebijakan dalam penggunaan dana APBN dan DAK , akan dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan selama 2 minggu (empat belas hari). Dua minggu di bulan agustus 2015.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam studi ini adalah semua instansi atau unit yang terkait dengan pengguna dana APBN dan DAK, yang dialokasikan untuk empat bidang yang diprioritaskan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang di gunakan di kabupaten Jayawijaya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yakni data yang dikumpulkan melalui survei secara langsung dari responden (Masyarakat atau stakeholder pengguna dana APBN dan DAK , SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Kesehatan, Kepala dinas PU,SKPD dinas pertanian, Kepala Bappeda Provinsi Papua)
2. Data Sekunder adalah data historis atau dokumen yang dihimpun atau diperoleh terutama dari lembaga/badan/dinas yang terkait dan dianggap relevan.

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan pada kajian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, berupa; dokumen laporan keuangan, dokumen peraturan daerah yang mengatur tentang PAD, data dan informasi tentang keadaan sumber daya alam, penduduk, sosial dan ekonomi masyarakat Provinsi Papua. Selain itu, juga digunakan buku-buku, karangan ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian terhadap potensi BUMD dan sumber-sumber PAD;
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan cara melakukan pengamatan (observasi) langsung di lapangan, wawancara mendalam (deep interview) dan pengedaran kuisioner terhadap:
3. Para Stakeholders ataupun pihak terkait dalam pengelolaan PAD di Provinsi Papua Pimpinan BUMD pusat dan daerah di Provinsi Papua

Teknik Analisis data

Untuk merealisasi pelaksanaan keuangan daerah yang baik diperlukan langkah – langkah yang realistik seperti:

1. Tahap pertama, perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan dan anggaran;
2. Tahap kedua, perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD dan swasta) dan pelaku pembangunan (Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga internasional);
3. Tahap ketiga perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemda;
4. Tahap ke empat adalah perlu adanya peningkatan komunikasi yang konstruktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Analisis Implementasi Proses Perencanaan Dan Penggunaan Dana APBN Dan DAK Tahun Anggaran 2012-2014 Di Kabupaten Jayawijaya Pada Empat Bidang Yang Diprioriaskan Yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kerakyatan.**

Bidang Pendidikan

Tabel 1.
Capaian Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Tahun 2013

No	Kegiatan	Sumber Dana	Capaian Realisasi 2013
A	PEMBERANTASAN TUNA AKSARA DAN PENGEMBANGAN PAUD		
1	Pemberantasan tuna aksara (orang)	APBN Kemdikbud	25.000 Orang
2	Revitalisasi PAUD (lembaga)	APBN Kemdikbud	842 Lembaga
3	Pendirian PAUD (unit)	APBN Kemdikbud	80 Unit

No	Kegiatan	Sumber Dana	Capaian Realisasi 2013
B	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR		
1	Revitalisasi SD-SMP (unit)	APBN Kemdikbud	413 Unit
C	PENYEDIAAN GURU		
1	Penyediaan guru SD-SMP (Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	APBN Kemdikbud	877 Orang

Sumber : *Deputi Bidang Bidang Pengendalian dan Evaluasi, 2014*

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Hingga tahun 2014 telah terdapat 72 PAUD yang tersebar di seluruh kampung, di Kabupaten Jayawijaya namun masih ada 78 kampung lagi yang belum mempunyai PAUD.

b. Pemberantasan Tuna Aksara

Saat ini terdapat 111.939 orang (yang terdiri dari 66.520 orang laki-laki dan 45.419 perempuan) tuna aksara yang telah dibina oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Peserta program pemberantasan tuna aksara berasal dari penduduk yang belum mengenal aksara dan juga siswa SD masuk SMP yang ternyata belum mampu membaca dan menulis. Selama ini yang dibina sudah dapat membaca dan menulis. Tahun 2014 telah dianggarkan dana untuk pengentasan buta huruf, yaitu untuk membayar honor tutor dan penyelenggaraan ujian (tahun sebelumnya tidak ada).

c. Pembangunan Rehabilitasi SD- SMP

Pada tahun 2013 telah dibangun tambahan ruang kelas di 10 SD masing-masing sebanyak 2 ruang kelas dan 6 perpustakaan untuk SD. Selain itu juga telah dibangun tambahan ruang kelas di 9 SMP masing-masing sebanyak 2 ruang kelas dan 2 perpustakaan SMP. Sumber biaya pembangunan berasal dari DAK dan DAU.

d. Pengadaan Tenaga Guru, Khususnya guru Kontrak SM3T

Tahun 2013 telah ditempatkan sebanyak 71 guru SM3T yang masing-masing berasal dari Universitas Negeri Malang sebanyak 38 orang (terdiri dari 14 laki-laki dan 24 perempuan) serta Universitas Mulawarman sebanyak 33 orang (terdiri dari 15 laki-laki dan 18 perempuan). Dari 71 guru SM3T didistribusikan ke 12 Distrik (Wamena, Hubokosi, Asologaima, Muliama, Walesi, Asolokobal, Maima, Asotipo, Walelagama, Kurulu, Yalengga, dan Bolokme).

e. Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah telah disalurkan sesuai dengan ketentuan.

Kesehatan

Tabel 2.
Capaian Fokus Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tahun 2013

No	Kegiatan	Sumber Dana	Capaian Realisasi 2013
1	Pengadaan tenaga kesehatan	APBN Kemenkes	666 Orang
2	Revitalisasi Puskesmas rusak sedang	DAK Yankesdas	41 Puskesmas
3	Revitalisasi Puskesmas rusak berat	DAK Yankesdas	
4	Pembangunan Puskesmas	DAK Yankesdas	24 Puskesmas
5	Pelayanan Kesehatan Bergerak	APBN-P Kemenkes	3 Kabupaten
6	Jamkesmas dan BOK	APBN Kemenkes	40 Kabupaten

Sumber : Deputi Bidang Bidang Pengendalian dan Evaluasi, 2014

a. Puskesmas dan Pustu

Ada 12 puskesmas, 18 Pustu dan 19 polindes dengan total jumlah tenaga kesehatan sebanyak 256 orang. (Lihat data terlampir), Secara fisik kondisi puskesmas dan pustu memenuhi persyaratan layak, Kendaraan untuk pelaksanaan puskesmas keliling ada 12 kendaraan yang tersebar di setiap puskesmas. Lokasi puskesmas berdekatan dengan perkampungan dan ada akses jalan menuju puskesmas. Di pustu tidak ada dokter. Dokter bertugas di puskesmas.

b. Pengadaan Tenaga Kesehatan

Pada tahun 2014 dinas kesehatan telah menambah tenaga kesehatan sebanyak: 53 tenaga tambahan dengan perincian sebagai berikut:

- Ada 35 orang Bidan PTT yang dibiayai dari dana pusat (APBN)
- Ada 9 orang Dokter PTT yang dibiayai dari dana APBD
- Ada 9 orang Dokter PTT yang dibiayai dari dana Pusat (APBN)

c. Pengadaan Obat-obatan

Bangunan farmasi secara fisik telah memenuhi persyaratan layak. Sumber pembiayaan untuk pengadaan obat berasal dari APBD, Jumlah dan jenis obat-obatan yang ada selama ini mencukupi untuk mendukung pelayanan di puskesmas. Mekanisme pendistribusian obat-obatan ke puskesmas dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun anggaran, disamping itu juga tergantung pada permintaan dari puskesmas dan pustu.

d. Pelayanan kesehatan bergerak

Ada kebijakan Khusus untuk distrik Trikora (carter pesawat Pulang pergi 36 Juta)

e. Jaminan Kesehatan (BPJS)

BPS sudah ada di kabupaten Jayawijaya dan sudah disosialisasikan di sector kesehatan, Sudah ada kerjasama untuk pelaksanaan JKN antara BPJS dengan dinas kesehatan dan puskesmas. Belum ada penetapan jumlah anggota/peserta di puskesmas

f. Pelaksanaan PM – TAS

Bahan PM-TAS sudah ada di kabupaten Jayawijaya, Sosialisasi pelaksanaan PM-TAS bagi tenaga sekolah dan puskesmas sudah dilaksanakan bahkan sudah dibentuk panitia pelaksana lapangan yang terdiri dari dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas agama. Sistem pendistribusiannya langsung dari bandara kemasling-masing sekolah, Jumlah SD dan murid yang ditetapkan pusat tidak sama dengan jumlah yang di tetapkan oleh daerah karena alasan pemerataan dan keadilan yang semula seminggu 4 kali menjadi seminggu 3 kali, Pelaksanaan PM-TS sudah dilaksanakan oleh panitia pelaksana yaitu dari dinas pendidikan dan kesehatan, dinas agama juga salah satu anggota tetapi tidak terlalu banyak terlibat.

g. Pelayanan Rujukan

- Tipe RSUD di kabupaten Jayawijaya adalah tipe D, secara fisik bangunannya telah memenuhi persyaratan layak, dengan luas tanah 43.493 m³, ini sesuai dengan sertifikat tanah.
- Sarana pendukung RSUD sudah ada tetapi masih belum mencukupi
 - Genset ada tapi kapasitasnya kurang, Alat kesehatan, Ambulance 1, Mobil jenazah 2, Laboratorium, Rontgen, Ruang jenazah, Rumah dokter dan paramedic masih sangat kurang, Dapur, Tempat parkir, cukup luas dan memadai, Air Bersih, yang ada sekarang adalah sumur gali dengan kedalaman 12 meter dan sumur bor 25 meter tidak menutup kemungkinan terkontaminasi dengan kuman/bakteri.

Ekonomi Kerakyatan

Tabel 3.
Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Tahun 2012-2013

No	Rencana		Capaian Realisasi	
	Kegiatan	Sumber Dana	2012	2013
1	Ternak Sapi di Bomberai, Kebar dan Sorong, Jayawijaya	APBN Kemtan	960 ekor	1.910 ekor
2	Ternak Babi	APBN Kemtan	900 ekor	1.300 ekor
3	Perluasan Areal Sawah	APBN Kemtan	6.700 ha	2.200 ha
4	Pengembangan kapal perikanan	APBN KKP	14 Kapal 30 GT	10 Kapal 30 GT
			16 Kapal 5-30 GT	13 Kapal 5-30 GT
5	Pembangunan/		3 unit (KUKM)	8 unit (KUKM)
	Revitalisasi Pasar		46 unit (KEMDAG)	57 unit (KEMDAG)

Sumber : Deputi Bidang Bidang Pengendalian dan Evaluasi, 2014

a. Perluasan Areal Sawah

1. Nama Kegiatan : Perluasan areal lahan pertanian di Kurulu
2. Satuan Kerja : Dinas Pertanian
3. Alokasi Anggaran : Rp. Sumber Dana/KL : APBN-P 2013 Kementerian Pertanian
4. 5 Lokasi/GPS : Jayawijaya / GPS : 04° 10' 41,6" S - 138°35'25,6" E
5. Status/Tahapan Kegiatan yang sedang dilaksanakan: Dalam proses pelaksanaan
6. Narasumber : Markus Mabel (Ketua kelompok)
7. Temuan : Pelaksanaan dimulai 2013 sampai dengan 2014 Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
8. Tingkat Perhatian Terhadap Masalah: Tidak Ada Masalah
9. Saran/Tindak lanjut : Perlu ada tindakan lanjut
10. Waktu Kunjungan / Peneliti : 5 Agustus 2015 Rachmaeny Indahyani

b. Perkembangan kawasan Peternakan Sapi/Indukan sapi potong

1. Nama Kegiatan : Pengembangan Kawasan peternakan sapi Induk
2. Satuan Kerja : Dinas Peternakan
3. Alokasi Anggaran : Rp. 288.166.732.000,-4 Sumber Dana/KL : APBN-P 2012 Kementerian Pertanian
4. Lokasi/GPS : Jayawijaya / GPS : 04° 10' 41,6" S - 138°35'25,6" E
5. Status/Tahapan Kegiatan yang sedang dilaksanakan: Dalam proses pelaksanaan
6. Narasumber : Benyamin Ilapok (ketua kelompok)
7. Temuan : Pelaksanaan dimulai 2012 sampai dengan 2014 Dilaksanakan oleh Dinas peternakan
8. Tingkat Perhatian Terhadap Masalah: tidak Ada Masalah
9. Saran/Tindak lanjut : membutuhkan Pabrik pengilingan untuk kornet dan alat pemotongan.
10. Waktu Kunjungan / Peneliti: 5 Agustus 2015 Rachmaeny Indahyani

c. Pengembangan Peternakan Babi

Pengembangan Peternakan Babi (2 Paket)

1. Nama Kegiatan : Penataan budidaya babi ramah lingkungan
2. Satuan Kerja : Dinas Peternakan Jayawijaya
3. Alokasi Anggaran : Rp. 280.000.000.000,-4 Sumber Dana : APBN-P 2013 Kementerian Pertanian
4. Lokasi/GPS : Jayawijaya / GPS : 04° 10' 41,6" S - 138°35'25,6" E
5. Status/Tahapan Kegiatan yang sedang dilaksanakan: Dalam proses pelaksanaan
6. Narasumber : 1. Gabriel Marien (Kepala Kampung Pikhe), dan 2. Nafar Alua (Ketua Kelompok Heragima)
7. Temuan : Pelaksanaan dimulai 2013 sampai dengan 2014 Dilaksanakan

Oleh Dinas Peternakan

8. Tingkat Perhatian Terhadap Masalah : Ada Masalah
9. Saran/Tindak lanjut : Babi untuk kelompok masyarakat pikhe di pindahkan ke distrik Elagaima, Babi yang diterima masih berumur 2 bulan, masih sulit beradaptasi jadi bisa mati
10. Waktu Kunjungan / Peneliti: 5 Agustus 2015 Rachmaeny Indahyani

Pengembangan Peternakan Babi (3 Paket)

1. Nama Kegiatan : Penataan budidaya babi ramah lingkungan
2. Satuan Kerja : Dinas Peternakan Jayawijaya
3. Alokasi Anggaran : Rp. 435.000.000.000,-4 Sumber Dana/KL : APBN-P 2013 Kementerian Pertanian
4. Lokasi/GPS : Jayawijaya / GPS : 04° 10' 41,6" S - 138°35'25,6" E
5. Status/Tahapan Kegiatan yang sedang dilaksanakan: Dalam proses pelaksanaan
6. Narasumber : 1. Daud Wanma (Ketua kelompok Ninai Silimo) HP : 08124804965, 2. Herman Yelipele (Ketua Kelompok Huliwa), dan 3. Istri Herman Walilo (Ketua Kelompok Didimo)
7. Temuan : Pelaksanaan dimulai 2013 sampai dengan 2014 Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan
8. Tingkat Perhatian Terhadap Masalah : Ada Masalah
9. Saran/Tindak lanjut : 1. Hanya di kasih Rp 500.000,-, 2. Masih memerlukan kandang, dan 3. Memerlukan seng untuk atap kandang, genset, pompa air dan panci untuk masak makanan babi
10. Waktu Kunjungan / Peneliti : 5 Agustus 2015 Rachmaeny Indahyani

2. Identifikasi dan Analisis capaian kinerja pengelolaan dan permasalahan penggunaan dana APBN dan DAK tahun anggaran 2012-2014 Di Kabupaten Jayawijaya

Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) Biaya yang masih minim.

Saat ini biaya untuk penyelenggaraan PAUD dibebankan kepada anggaran BOS. Tahun 2014 ini hanya dianggarkan bagi 61 PAUD sebesar Rp7,2 juta untuk masing-masing PAUD sehingga total sebesar Rp. 439.200.000,00. Selain itu juga diberikan anggaran Alat Peraga (APE) hanya bagi 2 PAUD saja masing-masing sebesar Rp10 juta. Selanjutnya PAUD di beberapa kampung membentuk Gugus PAUD. Untuk Gugus PAUD diberikan anggaran untuk 3 Gugus. Selain itu juga Mitra PAUD diberikan anggaran sebesar Rp. 20 juta untuk satu mitra saja.

- 2) Tenaga pengajar yang masih kurang

Tenaga pengajar PAUD hingga saat ini terdapat sekitar 200 guru. Jumlah ini masih kurang dibandingkan dengan jumlah anak berusia dini. Menurut Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, masih dibutuhkan sekitar 100 guru PAUD lagi.

3) Gedung untuk menyelenggarakan PAUD masih kurang, Alat permainan yang minim, Bahan pelajaran yang kurang (buku anak-anak), dan Pentingnya peningkatan gizi melalui makanan tambahan. Saat ini terdapat Pusat Pengembangan Anak yang didanai oleh Pemerintah Kanada. Pusat ini memberikan tambahan makanan kepada anak-anak berusia 3-8 tahun. Setiap Hari Senin dan Kamis diberikan tambahan makanan nasi dan ikan, Hari Selasa dan Kamis diberikan kue, dan Hari Rabu dan Jumat diberikan kacang hijau.

b. Pemberantasan Tuna Aksara

Isu dan Permasalahan

- 1) Tingginya angka tuna aksara di Kabupaten Jayawijaya selain karena masih ada penduduk yang belum pernah mengenal pendidikan untuk membaca dan menulis, juga disebabkan kurangnya tanggung jawab guru SD dalam memberikan pelajaran membaca dan menulis kepada anak didiknya. Hal ini menyebabkan masih banyak anak SD yang belum mampu membaca.
- 2) Masalah lainnya adalah ketiadaan gedung. Saat ini, kegiatan belajar membaca dan menulis dilakukan di gedung gereja atau di halaman. Terhadap kegiatan yang diselenggarakan di halaman menjadi masalah ketika hujan turun.
- 3) Isu menarik lainnya adalah bahwa motivasi yang tinggi dari peserta program pengentasan tuna aksara adalah keinginan yang besar untuk dapat membaca Alkitab.

c. Pembangunan Rehabilitasi SD- SMA

Isu yang menonjol terkait dengan pembangunan/rehabilitasi SD-SMP ini adalah masih ditemukan alokasi untuk pembangunan sekolah direlokasi menjadi kegiatan lainnya dengan alasan petunjuk teknis yang terlambat dibuat. Oleh karena itu perlu Pengawasan yang ketat dari Pemerintah Provinsi terkait dengan peruntukan anggaran pembangunan/rehabilitasi sekolah.

Masalah – masalah yang dihadapi dalam Pembangunan rehabilitasi Gedung SMA Kurulu: Prasarana belajar mengajar belum ada, Gedung asrama yang sudah dibangun tidak digunakan akhirnya rusak, sekarang mau dijadikan ruang kelas. Tidak ada ruang perpustakaan, Kondisi kamar mandi yang kurang memadai, Untuk Program ADEK, sekolah terlambat memasukan berkas, siswa yang dicalon ada 4 orang dengan tujuan UNIPA, Belum ada guru matematika dan guru fisika yang ada hanya guru kimia dan biologi dan bahasa inggris.

Masalah – masalah yang dihadapi dalam Rehabilitas Gedung SDN Minimo:

Tidak ada transparansi dalam penggunaan uang, Atk yang tidak ada. Kondisi kamar mandi yang kurang memadai, Untuk Program ADEM, sekolah belum mengetahui

d. Pengadaan Tenaga Guru, Khususnya guru Kontrak SM3T

Isu dan Permasalahan

1. Isu menarik bahwa Program SM3T dinilai memiliki kelebihan berupa hadirnya tenaga pengajar bermutu di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Etos kerja para guru SM3T diakui oleh beberapa guru lokal yang diwawancarai. Etos kerja itu antara lain ditunjukkan melalui hadir tepat waktu dalam mengajar dan tidak pernah bolos. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak Papua.
2. Namun demikian, program ini ternyata memiliki kelemahan. Pertama, perekrutan guru SM3T tidak pernah melibatkan Dinas Pendidikan. Sehingga, menurut mereka nama kegiatan yang tepat untuk program ini adalah Penempatan Guru SM3T (bukan Pengadaan Guru SM3T). Akibatnya, pada awalnya daerah tidak siap menerima guru tersebut, terkait dengan penampungan guru dan fasilitas yang dapat menunjang kehidupan dan mengajar mereka.
3. Kedua, kehadiran para guru SM3T ini telah mengakibatkan guru lokal menjadi semakin malas mengajar. Mereka malah mengandalkan para guru SM3T tersebut dalam mengajar. Dampak negatif yang dikhawatirkan adalah apabila pada suatu waktu program ini ditiadakan, sementara guru lokal sudah semakin malas, maka akan menjadi bumerang bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Diakui, bahwa sejak dana BOS disalurkan langsung kepada para guru, peran pembinaan Dinas Pendidikan kepada para guru menjadi kurang efektif. Akibatnya, sulit menindak guru yang tidak masuk mengajar, ditunjang kondisi geografi di pegunungan yang sulit dijangkau mengakibatkan pengawasan semakin melemah.
4. Ketiga, diakui bahwa saat ini penempatan para guru SM3T tersebut hanya di daerah pinggiran dan sudah maju (Distrik Wamen sebanyak 28 orang), belum mencapai daerah pedalaman (seperti Distrik Trikora). Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan keamanan para guru yang berasal dari Jawa dan Kalimantan, bukan dari Papua. Hal ini tentunya belum terlalu sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya program ini. Oleh karena itu disarankan agar ke depan tenaga pendidik lulusan Universitas Cendrawasih dan STPIK perlahan-lahan dapat diikutsertakan juga secara berdampingan dengan yang berasal dari Jawa dan Kalimantan yang dinilai sudah mengenal medan.

e. Bantuan Operasional Sekolah

Isu dan Permasalahan

Isu yang menonjol terkait dana BOS yaitu dengan sistem disalurkannya secara langsung dana BOS kepada kepala sekolah, mengakibatkan peran pembinaan dari Dinas Pembinaan kurang diperhatikan. Akibatnya guru banyak yang tidak masuk namun sulit diberikan sanksi.

Kesehatan

Isu dan Permasalahan

a. Puskesmas dan Pustu

Biaya rehabilitasi gedung, rumah tenaga kesehatan, perbaikan mobil puskesmas keliling, Pengadaan Alat Kesehatan, Penerangan dan transportasi, Masih Butuh tenaga Kesehatan

b. Pengadaan Tenaga Kesehatan

Masih Butuh tenaga Bidan, perawat, dokter sanitasi dan gizi, tenaga laboratorium dan tenaga radiologi, Yang jadi masalah adalah Pembayaran Honor tenaga PTT.

c. Pelayanan kesehatan bergerak

Ada kebijakan Khusus untuk distrik Trikora (carter pesawat Pulang pergi 36 Juta)

d. Jaminan Kesehatan (BPJS)

Masalahnya: Belum adanya data jumlah masyarakat yang mendapatkan kartu jaminan kesehatan, dan belum di tentukan puskesmas mana yang berhak melakukan BPJS,

e. Pelaksanaan PM – TAS

Masalahnya : Banyak biscuit yang rusak karena keterlambatan pengiriman, dan juga tidak ada gudang penampungan, sehingga pada saat di drop dibandara jika terlambat diambil maka biscuitnya bisa rusak.

f. Pelayanan Rujukan

Masalahnya:

- 1) RSUD Wamena Kabupaten jayawijaya belum mendapatkan rekomendasi dalam proses penetapan kelas oleh dinas kesehatan Provinsi untuk menjadi rumah sakit kelas C sesuai dengan Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010, tgl 11 Maret 2010 tentang klasifikasi rumah sakit
- 2) Untuk menjadi rumah sakit kelas C harus memenuhi beberapa persyaratan. Jabatan Direktur harus seorang tenaga medis, Ruang instalansi gawat darurat harus sesuai standar : IGD level II, Akses jalur masuk pasien IGD yang mudah, penataan ruang IGD khususnya ruang Resusitasi yang mudah di akses. Alat kesehatan dan obat-obatan emergensi yang selalu tersedia. Ruang rawat inab intensive (ICU, ICCU, NICU dan PICU) yang sesuai standar yang meliputi: penataan ruang intensive, penambahan jumlah alat kesehatan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia, peningkatan kemampuan SDM terutama perawat ICU yang bersertifikat terlatih ICU. Ruang Instalansi bedah (Kamar Operasi) yang berupa : Penata ruang operasi, Penataan tempat cuci tangan kamar operasi. Penyediaan pelayanan untuk promosi limbah cair dan limbah padat sesuai standar yang ditentukan. Kebutuhan yang masih belum di realisasi agar dapat memenuhi standar adalah: Rekomendasi dari dinas kesehatan Provinsi papua, Ruang instalansi gawat darurat yang

sesuai standar, Ruang instalansi bedah (kamar operasi), Penyediaan pelayanan untuk promosi kesehatan masyarakat di rumah sakit

Ekonomi Kerakyatan

a. Perluasan Areal Sawah di Distrik Asolokobal

Masalah

Luas areal sawah yang sangat luas tidak sebanding dengan jumlah tenaga penggarap sawah. Dalam hal ini jumlah pekerjanya hanya 8 orang itu juga lima orang diantaranya orang tua. Peralatan pertanian yang dipakai masih berupa jangkul dan skop tidak memiliki sapi untuk menggarap sawah, dan juga tidak ada mobil pembajak sawah. Pupuk maupun bibit yang tersedia masih alamiah, Walaupun sudah dibangun pabrik pengilingan padi, karena hasil panennya sedikit pabriknya tidak di gunakan secara maksimal. Kelompok petani yang ada tidak memiliki modal yang cukup. Mahalnya biaya transportasi untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar.

b. Perkebunan Kopi di Distrik yalellenga kampung Butmo

Masalah

Jarak tempuh dari perkebunan kekota yang sangat jauh harus ditempuh dengan menggunakan tarnsportasi dengan biaya yang cukup mahal, Alat pengiling kopi yang rusak, anggota kelompok tidak dapat memperbaikinya sehingga jika mau menggiling kopi harus ke kota, Jumlah tenaga kerja yang semakin hari semakin berkurang sehingga perkebunan kopi jadi tidak terawat Jumlah produksi kopi yang tidak menentu dan tidak suistainable.

c. Perkembangan kawasan Peternakan Sapi/Indukan sapi potong

Masalah

Belum ada alat atau pabrik pengolahan pakan sapi, Untuk membayar anggota kelompok belum ada dana, Manajemennya masih belum baik

d. Pengembangan Peternakan Babi

Permasalahan :

Pemindahan lokasi awal ke lokasi kedua tidak ada tersurat yang diketahui oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wamena, sebatas antar umat paroki dan tidak diketahui oleh Kepala Kampung Pikhe, sementara dalam pengajuan proposal Kepala Kampung Pikhe a.n Pak Gabriel Marien ikut menandatangani proposal tersebut.Hal tersebut dikarenakan Pasteur Paul pindah ke Sentani. Kenyataannya ditempat kedua babi tidak terawat dengan baik, kurang pakan bahkan sebetulnya jamaatnya tidak sanggup memelihara, sehingga menimbulkan kematian 8 ekor dalam waktu 2 bulan pemeliharaan dan tersisa 12 ekor dalam keadaan yang mengkhawatirkan.

Kelompok kedua yakni Kelompok Heragima sebagai berikut Kelompok kedua yakni Kelompok Heragima sebagai berikut

Permasalahan :

Ketua kelompok jarang berada dilokasi, sehingga yang melakukan pemeliharaan sepupunya dengan pengalaman yang minim. Kelompok mendapatkan babi dengan umur 1 bulan, mengingat harga babi umur 1 bulan bisa diharga Rp 3 juta/ekor. Sedangkan untuk mendapatkan babi diatas umur 4 bulan sudah tidak sesuai lagi dengan dana yang tersedia

Permasalahan :

Untuk menuju lokasi kami harus berjalan kearah pelosok sekitar 20 km, bagaimana pengadaan ternak dengan jarak demikian jauh, bukankah hal ini patut diapresiasi, untuk itu saran kami ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wamena, Kelompok Didima sebagai kelompok percontohan.

Permasalahan :

- 1) Kelompok Ninai Silimo ini merupakan kelompok terburuk, dimana babi mati semua dan kandang dalam keadaan kotor dan tidak terawat.
- 2) Adanya indikasi permainan dalam pengadaan babi antara rekanan dan kepala kampung, kepala Kampung mengatasnamakan babi perorangan ini dijadikan babi fasilitas pemerintah, setiap bulan peternak perorangan ini diberi uang sebesar Rp 500.000,- untuk keperluan pakan dan peralatan /wadah pakan. Pemeliharaan selama pengawasan kepala kampung uang yang diberikan sebanyak 4 kali. Jadi jumlah uang yang diberikan Rp 2.000.000,-
- 3) Peternak merasa dirugikan, sehingga ternak babi terlantar bahkan dikonsumsi tanpa sepengetahuan kepala kampung dan dilaporkan mati.

3. Arah Kebijakan Keuangan daerah

Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Solusi yang diharapkan

- 1) Peningkatan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD melalui Dana Otsus, baik untuk membangun gedung, menyediakan alat permainan, mengadakan bahan pelajaran.
- 2) Koordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan gizi bagi anak usia 3-8 tahun sebagaimana yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Anak dari Kanada.
- 3) Penyediaan guru PAUD, baik melalui program semacam SM3T.

b. Pemberantasan Tuna Aksara

Solusi yang diharapkan adalah: Meningkatkan pengawasan terhadap guru yang mengajar di SD, Menyediakan ruang belajar, dapat juga memanfaatkan fasilitas pemerintah kampung

c. Pembangunan Rehabilitasi SD- SMA

Harapan Untuk SMA Kurulu kedepannya: Perlu pengadaan kelas baru, ruang laboratorium, perpustakaan (lahan tersedia), Perlu pengadaan rumah guru, Perlu tambahan guru untuk bidang matematika dan fisika.

Harapan kedepannya Gedung SD N Minimo: Perbaiki kamar mandi, Pengadaan Meubeler untuk 2 kelas

d. Pengadaan Tenaga Guru, Khususnya guru Kontrak SM3T

Solusi yang Diharapkan: Melibatkan Pemerintah Daerah (khususnya Dinas Pendidikan) dalam menentukan jumlah guru yang akan ditempatkan di Kabupaten Jayawijaya dan bidang studi yang dibutuhkan. Merekrut juga tenaga yang berasal dari universitas/sekolah tinggi pendidikan di Papua agar dapat ditempatkan di daerah yang benar-benar pedalaman, bukan hanya di pinggiran seperti saat ini. Mempertimbangkan tingkat kemahalan di beberapa daerah khususnya yang kondisi geografisnya sangat sulit sehingga dapat ditingkatkan honor guru.

e. Bantuan Operasional Sekolah

Solusi yang Diharapkan

Penyaluran dana BOS kembali disalurkan melalui Pemerintah Daerah. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, dapat dilakukan pengawasan melalui pengawasan internal maupun dari BPKP atau bahkan KPK.

Kesehatan

a. Puskesmas dan Pustu

Solusi yang diharapkan: Perlu adanya rehabilitasi gedung kesehatan rumah tenaga kesehatan, perbaikan mobil puskesmas keliling, Perlu pengadaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan

b. Pengadaan Tenaga Kesehatan

Solusi yang diharapkan : Perlu adanya pengadaann tenaga PTT yang disertai alokasi anggaran untuk membiayai tenaga PTT.

c. Pelayanan kesehatan bergerak

Ada kebijakan Khusus untuk distrik Trikora (carter pesawat Pulang pergi 36 Juta)

d. Jaminan Kesehatan (BPJS)

Solusinya : Perlu ada data masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan BPJS dan perlu ada standar puskesmas yang berhak melayani masyarakat dengan menggunakan BPJS.

e. Pelaksanaan PM – TAS

Solusinya : perlu dipikirkan cara distribusi yang baik agar biscuitnya tidak rusak dan sampai ke tempat tujuan.

f. Pelayanan Rujukan

Solusinya adalah: Perlu komitmen yang keras antara petugas Dinas kesehatan, rumah sakit, dan Bupati dalam menyusun rencana dan alokasi anggaran untuk memenuhi kekurangan yang telah di tentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Ekonomi Kerakyatan

a. Perluasan Areal Sawah di Distrik Asolokobal

Solusi masalah : Petani pengarapnya masih harus di beri pengetahuan tentang teknik penanaman padi, Selain pengetahuan, penyediaan bibit dan saprodi juga perlu disiapkan. Perlu adanya tambahan modal bagi petani.

b. Perkebunan Kopi di Distrik Yalellenga Kampung Butmo

Solusi masalah: Perlu adanya penelitian tentang evaluasi proyek perkebunan kopi, Perlu adanya kepastian produksi, maangemen pengelolaan yang baik, jumlah tenaga kerja tetap yang baik dan mengetahui cara berkebun kopi dengan baik, Perlu adanya pendamping teknis lapangan.

c. Perkembangan kawasan Peternakan Sapi/Indukan sapi potong

Solusi masalah: Perlu ada penelitian tentang evaluasi proyek usaha pembibitan ternak sapi, Harapan Peternak kedepan adalah perlu adanya alat pengolahan pakan sapi, Perlu ada usaha lain yang harus dikembangkan agar dapat membayar tenaga kerja.

d. Pengembangan Peternakan Babi

Pengembangan Peternakan Babi (2 Paket)

Kelompok pertama yakni Kelompok Gardianat St Franciscus sebagai berikut :

Tindak lanjut Penyelesaian Masalah, disarankan agar babi tersebut diserahkan kepada Kepala Kampung Pikhe (Gabriel Marien) yang mengharapkan bantuan tersebut sejak awal di alamat awal penerimaan.

Kelompok kedua yakni Kelompok Heragima sebagai berikut :

Tindak lanjut Penyelesaian Masalah, disarankan kedepannya agar pengadaan babi di Papua 10 atau 12 kali lipat harga babi di Pulau Jawa dan pemeliharaan harus langsung ditangani anggota kelompok.

Pengembangan Peternakan Babi (3 Paket)

Kelompok pertama yakni Kelompok Didima :

Harapan kelompok kedepan agar ada lagi bantuan pengadaan babi, pengadaan kandang dan mesin pompa air dimaksudkan untuk pengembangan populasi babi dan kebersihan babi itu sendiri.

Kelompok kedua yakni Kelompok Huliwa :

Kelompok Huliwa ini kelompok kedua yang perlu diapresiasi karena kondisi babi yang bersih dan kandang tidak bau ini, sehingga tidak ada pencemaran lingkungan. Untuk itu Kelompok Huliwa sebagai kelompok percontohan.

Harapan kelompok kedepan agar ada lagi bantuan babi dan pengadaan kandang dimaksudkan untuk pengembangan populasi.

Kelompok ketiga yakni Kelompok Ninai Silimo :

Harapan peternak kedepan agar ada lagi bantuan babi yang legal dan pengadaan kandang dimaksudkan untuk pengembangan populasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Analisis implementasi proses perencanaan dan penggunaan dana APBN dan Dak tahun anggaran 2012-2014 di kabupaten Jayawijaya pada empat bidang yang diprioriaskan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan secara ringkas dapat diuraikan nama-nama proram yang direncanakan permasing-masing bidang sebagai berikut ini, Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini, Pemberantasan Tuna Aksara, Pembangunan Rehabilitasi SD- SMP, Pengadaan Tenaga Guru, Khususnya guru Kontrak SM3T, Bantuan Operasional Sekolah

Program Kesehatan: Pengadaan Tenaga Kesehatan, Puskesmas dan Pustu, Pengadaan Obat-obatan, Pelayanan kesehatan bergerak, Jaminan Kesehatan (BPJS), Pelaksanaan PM – TAS, Pelayanan Rujukan,

Program Infrastruktur : Proyek Pembangunan Jembatan di Kabupaten Jayawijaya,

Proyek Pembangunan Bandara Wamena, Proyek Pembangunan Jembatan Hanel sepanjang 25 m x 9 m, Proyek Pembangunan Jembatan Ibele tinggi \pm 5 m dan lebar 9 m abutment K-225, lantai jembatan K-350, isian tiang pancang K-175, tiang pancang pipa baja dia 40,64 cm, tebal 9 mm, ulir U-232 polos U-24. 1 sisi arah wamena, Proyek Pembangunan Jembatan Wesaput TA. 2011 Pembangunan sudah selesai dilaksanakan, namun pengaspalan belum terlaksana secara keseluruhan, Perluasan aprom 10 x 9 m telah selesai, namun belum dapat digunakan, Perpanjangan runway dibiayai oleh APBD Kabupaten sepanjang 100 m dan APBN 2013 sepanjang 300 m

Program Ekonomi Kerakyatan :Perluasan Areal Sawah, di Wamena, Perkebunan Kopi, Perkembangan kawasan Peternakan Sapi/Indukan sapi potong, Pengembangan Peternakan , Revitalisasi Pasar di Kabupaten Jayawijaya

2. Arah Kebijakan Keuangan daerah yang dapat dipertimbangan untuk perencanaan selanjutnya permasing-masing bidang adalah sebagai berikut :

Rekomendasi Untuk Pendidikan:

Kebijakan dalam pendidikan yang dijawantahkan dalam beberapa program di Kabupaten Jayawijaya, khususnya dalam Program ADIK, ADEM, dan Vokasi kurang berjalan dengan baik karena kurang dukungan anggaran dalam APBD yang hingga kini juga belum juga diakomodir dalam APBD. Kondisi ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah kurang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Masih ditemukannya fenomena Port Numbai harus disikapi dengan hati-hati dan bijaksana. Peran Pemerintah Provinsi sangat besar dalam hal ini mengingat beberapa Program menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Jayapura merupakan ibukota provinsi. Ke depan, penting meminta komitmen kepala daerah untuk mendukung program dan ikut juga dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

Rekomendasi Untuk Kesehatan:

Untuk meningkatkan tipe rumah sakit menjadi tipe c perlu adanya asistensi dari dinas kesehatan provinsi. Untuk memenuhi syarat RSDU tipe c dengan penambahan tenaga kesehatan dengan menggunakan tenaga dokter PTT, sangat tidak dianjurkan. Penambahan pustu harus di sertai dengan tenaga kesehatan, Pengadaan obat-obatan yang sudah dialokasikan di kabupaten pada tahun anggaran sekarang harus mempertimbangan pengadaan obat-obatan untuk tahun kedepan, Ke depan, penting meminta komitmen kepala daerah untuk mendukung program dan ikut juga dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

Rekomendasi Untuk Ekonomi Kerakyatan

Kedepannya, agar pengadaan babi di Papua sepuluh kali lipat dari harga babi di Pulau Jawa. Dan pemeliharaannya, harus ditangani langsung oleh anggota kelompok.

Pasar potikelek Perlu tindak lanjut untuk segera diresmikan oleh pemerintah daerah, Pasar Kurulu, Perlu adanya aktivitas ekonomi dipasar kurulu, Pasar Usilimo, aktivitas ekonomi jangan hanya dilakukan pada saat festival perang aja, Pasar Jibama perlu ada rehabilitasi pasar karena sudah banyak bangunan yang sudah rusak, Pasar Sinakma, masih banyak penjual yang duduk berjualan di lapangan tanpa perlindungan atap.

Saran

1. Bagi Pemerintah daerah Diperlukan adanya Perhatian yang lebih cermat dan mendalam tentang apa yang sudah direncanakan, dan yang sudah dijalankan, serta permasalahan yang timbul untuk dijadikan acuan pada saat penyusunan rencana di tahun-tahun selanjutnya.
2. Bagi Masyarakat adalah peluang dan kesempatan yang ada dan sudah diberikan oleh pemerintah agar dijalani secara professional dan baik agar terjadi perubahan dalam kesejahteraan hidup.

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan pengembangan penelitian selanjutnya masih sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana, waktu, Sumber Daya Manusia yang membatasi kesempurnaan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Imron, M.A, 2006, *Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa*, Jurnal Ilmiah Administrasi, 6(1): 20-28.
- Irwan. T.R., 2005, *Kemampuan Fiskal Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta
- Mardi, Y.H., 2000, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Makalah Seminar Sehari di Bappenas, Bappenas, Jakarta.
- Machfud, S., 1999, *Kebijakan Implementasi dan Pandangan Kedepan Perimbangan Pusat dan Daerah*, Makalah Seminar Sehari di Bappenas, Bappenas, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2004, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.